

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat Ketergantungan adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (Bisma dan Susanto, 2010). Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah adalah suatu gambaran yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mengandalkan pembiayaan pengeluaran daerahnya dari transfer pemerintah pusat (Maulida, 2021). Tingkat ketergantungan keuangan daerah juga dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah (Mahmudi, 2019:140). Tingkat ketergantungan keuangan daerah dapat ditunjukkan dengan besarnya dana transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana transfer adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Mahmudi (2019:73), pendapatan transfer diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu:

1. Transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Pendapatan transfer jenis ini meliputi dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus;
2. Transfer pemerintah pusat lainnya. Pendapatan transfer jenis ini meliputi dana otonomi khusus dan dana penyesuaian;
3. Transfer pemerintah provinsi (khususnya untuk pemerintah kabupaten/kota). Pendapatan transfer jenis ini meliputi pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bagi hasil lainnya).

Semakin tinggi dana transfer yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka semakin tinggi pula tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan yang dialami oleh pemerintah daerah disebabkan karena pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di daerahnya, sehingga pembiayaan dalam pembangunan daerah cenderung mengandalkan dana dari pemerintah pusat. Wisaksono (2008) mengatakan bahwa kemampuan daerah masih rendah dalam menggali pendapatan yang berasal dari sumber internal sehingga pemerintah daerah belum mampu sepenuhnya secara mandiri dalam mendanai kegiatan pembangunan.

2.1.1.2 Pengukuran Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Untuk melihat ketergantungan keuangan daerah, dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Menurut Mahmudi (2019:140) tingkat ketergantungan keuangan daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2.1.2 Ukuran Pemerintah Daerah

2.1.2.1 Pengertian Ukuran Pemerintah Daerah

Menurut Patrick (2007) dalam penelitian Setyaningrum dan Safitri (2012) Ukuran suatu organisasi merupakan salah satu elemen yang ada pada struktur organisasi. ukuran pemerintah daerah adalah sebuah skala yang menunjukkan besar kecilnya keadaan pemerintah daerah (Hartono, dkk. 2014). Menurut Noviyanti dan Kiswanto, ukuran pemerintah daerah adalah Besar atau kecilnya pemerintah yang ditunjukkan dengan besarnya aset pemerintah daerah. Ukuran daerah mengacu pada seberapa besar suatu organisasi. Pemerintah daerah dengan ukuran yang besar diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Menurut Kusumawardani (2012), ukuran pemerintah yang besar akan memberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah pemberian pelayanan yang memadai kepada masyarakat. Selain itu, semakin besar ukuran pemerintah daerah, maka semakin besar pula kesempatan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang ada pada daerah tersebut. Hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerah jika pengelolaannya dilakukan dengan baik.

Dalam konteks pemerintahan, besar kecilnya suatu pemerintahan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Semakin besar total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka semakin besar pula ukuran pemerintah daerahnya. Aset merupakan jumlah sumber daya yang dimiliki suatu entitas untuk melakukan kegiatan operasional entitas tersebut. Ukuran pemerintah daerah yang diukur dengan total aset digunakan untuk mengetahui besar kecilnya objek dan kelengkapan sumber daya serta fasilitas dari pemerintah daerah tersebut.

Menurut Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengungkapkan:

“Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.”

Menurut Halim (2007:108), aset dapat dikelompokkan menjadi aset jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

2.1.2.2 Pengukuran Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah dapat diketahui dengan beberapa cara. Menurut Prasajo dan Purwanto (2013) Ukuran suatu organisasi dapat diketahui dari tingkat penjualan, jumlah pekerja, tingkat perputaran, dan total aset. Menurut Damanpour (1991) dalam Darmanto (2012) Ukuran pemerintah daerah dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan, dan tingkat produktivitas. Berdasarkan cara tersebut, pengukuran ukuran pemerintah daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Total Aset

Ukuran Pemerintah Daerah = Total Aset

b. Jumlah Pegawai

Ukuran Pemerintah Daerah = Jumlah Pegawai

c. Total pendapatan

Ukuran Pemerintah Daerah = Total Pendapatan

d. Tingkat Produktivitas

Ukuran Pemerintah Daerah = Tingkat Produktivitas

Berdasarkan beberapa cara pengukuran ukuran pemerintah di atas, penulis menggunakan total aset sebagai dasar pengukuran ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini. Alasan penulis menggunakan total aset sebagai indikator ukuran pemerintah daerah karena aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah memiliki potensi yang dapat meningkatkan pendapat asli daerah yang akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah jika dimanfaatkan secara optimal.

2.1.3 Kompleksitas Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kompleksitas Pemerintah Daerah

Kompleksitas adalah kondisi dan beragamnya faktor-faktor yang ada di lingkungan, baik di internal maupun di eksternal yang dapat mempengaruhi suatu organisasi (Khasanah dan Rahardjo, 2014). Dalam pemerintahan, kompleksitas

dapat didefinisikan sebagai kondisi dimana terdapat faktor yang beragam dengan memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang dapat mempengaruhi pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.1.3.2 Pengukuran Kompleksitas Pemerintah Daerah

Kompleksitas pemerintah daerah dapat diketahui berdasarkan beberapa cara. Dalam mengukur Kompleksitas Pemerintah daerah, Priyono, dkk (2018) menggunakan Jumlah Penduduk dan Jumlah SKPD, Khairana dan Subardjo (2018) menggunakan jumlah SKPD, Maulana (2015) menggunakan Jumlah DPRD dan Ukuran Legislatif, sedangkan Martani dan Puspita (2012) menggunakan Jumlah Penduduk. Berdasarkan cara pengukuran tersebut, maka pengukuran kompleksitas daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk

$$\text{Kompleksitas Pemerintah Daerah} = \text{Jumlah Penduduk}$$

b. Jumlah SKPD

$$\text{Kompleksitas Pemerintah Daerah} = \text{Jumlah SKPD}$$

c. Ukuran Legislatif

$$\text{Kompleksitas Pemerintah Daerah} = \text{Ukuran Legislatif}$$

Dalam Penelitian ini, untuk mengetahui kompleksitas pemerintah daerah ditunjukkan dengan banyaknya jumlah penduduk. Penduduk adalah sejumlah orang yang sah yang mendiami suatu daerah atau negara serta menaati ketentuan-ketentuan dari daerah atau negara tersebut (Asmuruf, dkk. 2015). Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula fasilitas yang harus disediakan oleh

pemerintah untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat, maka pendapatan yang ditarik juga akan meningkat (Asmuruf, dkk. 2015). Maka dari itu, pemerintah daerah harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar dapat memenuhi kebutuhan penduduk dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

2.1.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi (Bastian, 2006:77). Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Menurut Saraswati (2019), kinerja keuangan pemerintah adalah adalah suatu pencapaian dari program/kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu yang kemudian diukur dengan menggunakan indikator-indikator keuangan.

Kinerja keuangan itu sendiri pada dasarnya adalah cara yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya dan mampu menggali potensi-potensi daerahnya yang dapat menghasilkan pendapatan asli daerah (Hidayat dkk, 2007). Kinerja Keuangan dapat dikatakan baik apabila mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Menurut Patarai (2016), prinsip-

prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi, akuntabilitas, dan *value for money*.

2.1.4.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Halim (2007:230), pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah dapat digunakan untuk:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah;
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah;
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah;
4. Melihat kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah;
5. Melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD. Adapun beberapa analisis rasio keuangan yaitu sebagai berikut:

1. Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola pendapatan (Heriawati, 2020). Rasio ini menunjukkan seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah. Semakin

tinggi kontribusi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Mahmudi (2019:140) mengatakan rasio derajat desentralisasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah (Mahmudi, 2019:140).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

3. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang sudah direncanakan kemudian dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan berdasarkan dengan potensi riil daerah (Halim, 2007:234). Semakin tinggi rasio efektivitas yang dimiliki

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio Efisiensi

Menurut Mahmudi (2019:141), Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah. Adapun efisiensi pendapatan asli daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

5. Rasio Aktivitas

Menurut Halim (2007:235) rasio aktivitas menunjukkan semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin, maka persentase dana yang dialokasikan untuk belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana masyarakat cenderung akan semakin kecil.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

6. Rasio Pertumbuhan

Menurut Halim (2007:241) rasio pertumbuhan menunjukkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan keberhasilan yang dicapai atas kinerja pemerintah daerah tersebut dari periode ke periode selanjutnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rasio pertumbuhan, yaitu pertumbuhan pendapatan asli daerah sebagai indikator Kinerja Keuangan Daerah.

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1}}{\text{PAD}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PAD_t = Jumlah PAD pada tahun yang dihitung

PAD_{t-1} = Jumlah PAD pada tahun sebelumnya

2.1.5 Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Menurut Siregar (2015:130), Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

a. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi

wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Menurut Siregar (2015:142), pada dasarnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah berbentuk dividen, yaitu bagian laba yang diberikan kepada pemerintah daerah. Terdapat tiga kategori penerimaan dividen, diantaranya yaitu dividen atas penyertaan modal pada BUMD, BUMN, dan Perusahaan Swasta.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan yang bersumber dari selain ketiga pendapatan di atas. Pendapatan ini berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan penerimaan jasa giro.

2. Pendapatan Transfer

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dana transfer adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

a. Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 36 Ayat 1, dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
- 2) Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 3) Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus yang sesuai dengan peraturan undang-undang.

- c. Transfer Pemerintah Provinsi berupa Dana Bagi hasil dari Provinsi

Dana bagi hasil provinsi terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Pendapatan jenis ini meliputi pendapatan hibah dan dana darurat.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Adapun Penelitian-penelitian lain yang mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tiara Pandansari (2016) dengan judul Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian ini yaitu Tingkat Ketergantungan pada Dana Alokasi Umum dan Tingkat Ketergantungan pada Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan Tingkat ketergantungan pada Dana Alokasi Khusus dan Kompleksitas Pemerintah tidak berpengaruh pada Tingkat Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Prasella Pangestu, Dini Rosdini, dan Sri Mulyani (2021) dengan judul Pengaruh Tingkat Kekayaan dan Tingkat Ketergantungan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hasil dari Penelitian ini yaitu Tingkat Kekayaan Daerah dan Tingkat Ketergantungan Daerah pada Pusat berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
3. Berti Indah Sari dan Halmawati (2021) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hasil dari Penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Dewi Sarifah Tullah, Erma Apriyanti, dan Fitri Rianti (2019) dengan judul Pengaruh Ukuran Daerah, Opini Audit, dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap *Audit Delay* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu Ukuran Daerah tidak mempengaruhi *Audit Delay*, sedangkan Opini Audit dan Tingkat Ketergantungan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap *Audit Delay*.
5. Yulia Yustikasari (2018) dengan judul Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Kompleksitas Pemerintahan, dan Tingkat Kesejahteraan Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan pada *Website* Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Se-Indonesia). Hasil

dari penelitian ini yaitu Kualitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan pada *Website* Pemerintah Daerah, Kompleksitas Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan pada *Website* Pemerintah Daerah, sedangkan Tingkat Kesejahteraan Daerah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan pada *Website* Pemerintah Daerah.

6. Deka Anugerah Hadi dan Mia Angelina Hidayat (2020) dengan judul Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah, dan Jumlah Penduduk terhadap Pengungkapan *Internet Budgeting Reporting* (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera). Hasil dari penelitian ini yaitu Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap *Internet Budgeting Reporting*, sedangkan Kekayaan Pemerintah Daerah dan Jumlah Penduduk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Internet Budgeting Reporting*.
7. Mirna Sesotyaningtyas (2012) dengan judul Pengaruh *Leverage*, Ukuran Legislatif, *Intergovernmental Revenue*, dan Pendapatan Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian ini yaitu *Leverage*, Ukuran Legislatif, *Intergovernmental Revenue*, dan Pendapatan Pajak Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Rasio Efisiensi Kinerja. Sedangkan secara parsial, *Leverage*, Ukuran Legislatif, dan *Intergovernmental Revenue* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Rasio Efisiensi Kinerja.

Kemudian, Pendapatan Pajak Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Rasio Efisiensi Kinerja.

8. Ni Made Diah Permatasari dan I Ketut Mustanda (2019) dengan judul Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian ini yaitu Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
9. M. Safery dan Erly Mulyani (2020) dengan judul Pengaruh pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2017). Hasil dari penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Kompleksitas Pemerintah Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal pada Pemerintah Daerah.
10. Dwi Saraswati dan Yunita Sari Rioni (2019) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

11. Ni Putu Gina Sukma Antari dan Ida Bagus Panji Sedana (2018) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
12. Winda Khairana dan Anang Subardjo (2018) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kualitas SDM, Kompleksitas, dan Ukuran Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Hasil dari penelitian ini yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal, Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal, dan Kompleksitas Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal.
13. I Gusti Made Ary Anggara Tama (2018) dengan judul Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian ini yaitu Ukuran dan Karakteristik Kepala Daerah yang diproyeksikan oleh lama masa kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Temuan Audit BPK dan Karakteristik Kepala Daerah yang diproyeksikan oleh umur dan pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

14. Neni Nurhayati dan Amir Hamzah (2020) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil dari Penelitian ini yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
15. Indriani Azis dan Dini Wahjoe Hapsari (2020) dengan judul Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah terhadap *Internet Financial Reporting* (Studi Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur Periode 2015-2018). Hasil dari penelitian ini yaitu Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah berpengaruh secara simultan terhadap *Internet Financial Reporting*. Secara parsial Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan positif, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*.
16. Rudythia Dwitama dan Sri Rahayu (2020) dengan judul Pengaruh Ukuran Pemerintah, *Intergovernmental Revenue*, dan Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018). Hasil dari Penelitian ini yaitu Ukuran Pemerintah, *Intergovernmental Revenue*, dan Opini Audit secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Rasio Efektivitas dan Efisiensi. Sedangkan secara Parsial, Ukuran Pemerintah tidak berpengaruh

signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Rasio Efisiensi, *Intergovernmental Revenue* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan Opini Audit berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Rasio Efisiensi.

17. Armaja, Ridwan Ibrahim, dan Aliamin (2015) dengan judul Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh). Hasil penelitian ini yaitu Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah baik secara bersama-sama maupun secara terpisah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.
18. Sri Mulyani dan Hardiyanto Wibowo (2017) dengan judul Pengaruh Belanja Modal, Ukuran pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2015). Hasil dari Penelitian ini yaitu Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan *Intergovernmental Revenue*, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
19. Nuwun Priyono, Siti Arifah, dan Eva Wulandari (2018) dengan judul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kompleksitas Pemerintah Daerah, dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kinerja Fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini yaitu Hanya Kekayaan Daerah dan

Jumlah Penduduk yang berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Fiskal, sedangkan secara simultan, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, dan Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kinerja Fiskal.

20. Ardiyan Natoen, Ayu Febriyanti, Sarikadarwati, dan Susi Ardiani (2019) dengan judul Pengaruh Karakteristik Pemerintahan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan (Studi Empiris pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2013-2017). Hasil dari penelitian ini yaitu Jumlah Penduduk, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Kekayaan Pemerintah Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel 2. 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Tiara Pandansari 2016 Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Ketergantungan • Kompleksitas Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda 	Tingkat Ketergantungan pada Dana Alokasi Umum dan Tingkat Ketergantungan pada Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan Tingkat Ketergantungan pada Dana Alokasi Khusus dan Kompleksitas	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 19, No. 3 Desember 2016 Halaman 463-485 Universitas Muhammadiyah Purwokerto ISSN: 1979-6471

				Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	
2	Parasella Pangestu Primadiva, Dini Rosdini, dan Sri Mulyani 2021 Pengaruh Tingkat Kekayaan dan Tingkat Ketergantungan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Ketergantungan Daerah • Kinerja Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kekayaan • Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda 	Tingkat Kekayaan Daerah dan Tingkat Ketergantungan Daerah pada pusat berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	Jurnal Paradigma Ekonomika Vol. 16 No. 2 April-Juni 2021 Halaman 299-310 Universitas Padjadjaran ISSN 2085-1960 (<i>print</i>); 2684-7868 (<i>online</i>).
3	Berti Indah Sari dan Halmawati 2021 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Alokasi Umum • Belanja Daerah 	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 3, No. 1 Februari 2021 Halaman 1-11 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang e-ISSN: 2656-3649 (<i>Online</i>)
4	Dewi Sarifah Tullah, Erma Apriyanti, dan Fitri Rianti 2019 Pengaruh Ukuran Daerah, Opini Audit, dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap <i>Audit Delay</i> pada	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Pemerintah Daerah • Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Opini Audit • <i>Audit Delay</i> • Menggunakan Analisis Statistik Regresi Berganda 	Ukuran Daerah tidak mempengaruhi <i>Audit Delay</i> , sedangkan Opini Audit dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Audit Delay</i> .	Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan STIE Pandu Madania Vol. 12, No. 2 Agustus 2019 Halaman 171-185 p-ISSN: 2086-7662 e-ISSN: 2622-1950

	Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia				
5	Yulia Yustikasari 2018 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Kompleksitas Pemerintahan, dan Tingkat Kesejahteraan Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan pada <i>Website</i> Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Se-Indonesia)	<ul style="list-style-type: none"> • Kompleksitas Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Laporan Keuangan • Tingkat Kesejahteraan Daerah • Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan pada <i>Website</i> Pemerintah Daerah 	Kualitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan pada <i>Website</i> Pemerintah Daerah, Kompleksitas Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan pada <i>Website</i> Pemerintah Daerah, sedangkan Tingkat Kesejahteraan Daerah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan pada <i>Website</i> Pemerintah Daerah.	Jurnal Riset Akuntansi Terpadu Vol.11, No. 2 April 2018 Halaman 28-44 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana p-ISSN: 1979-682X e-ISSN: 2528-7443
6	Deka Anugerah Hadi dan Mia Angelina Setiawan 2020 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah, dan Jumlah Penduduk terhadap Pengungkapan <i>Internet Budgeting Reporting</i> (Studi	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Pemerintah Daerah • Jumlah Penduduk (Kompleksitas Pemerintah Daerah) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Pemerintah Daerah • Pengungkapan <i>Internet Budgeting Reporting</i> • Menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda 	Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Internet Budgeting Reporting</i> , sedangkan Kekayaan Pemerintah Daerah dan Jumlah Penduduk tidak memiliki pengaruh yang signifikan	

	Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera)			terhadap <i>Internet Budgeting Reporting</i> .	
7	Mirna Sesotyaningtyas 2012 Pengaruh <i>Leverage</i> , Ukuran Legislatif, <i>Intergovernmental Revenue</i> , dan Pendapatan Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan • <i>Intergovernmental Revenue</i> (Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Leverage</i> • Ukuran Legislatif • Pendapatan Pajak Daerah 	<i>Leverage</i> , Ukuran Legislatif, <i>Intergovernmental Revenue</i> , dan Pendapatan Pajak Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Rasio Efisiensi Kinerja. Sedangkan secara parsial, <i>Leverage</i> , Ukuran Legislatif, dan <i>Intergovernmental Revenue</i> tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Rasio Efisiensi Kinerja. Kemudian, Pendapatan Pajak Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Rasio Efisiensi Kinerja.	<i>Accounting Analysis Journal</i> Universitas Negeri Semarang 2012 ISSN: 2252-6765
8	Ni Made Diah Permatasari dan I Ketut Mustanda 2019 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Pemerintah Daerah • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Belanja Modal • Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda 	Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap	E-Jurnal Manajemen, Vol.8, No 8, 2019 Halaman 4759-4787 Universitas Udayana ISSN: 2302-8912

	Pemerintah Daerah			Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	
9	M. Saferi dan Erly Mulyani 2020 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Pemerintah Daerah • Kompleksitas Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah 	Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Kompleksitas Pemerintah Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal pada Pemerintah Daerah.	Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 2, No. 1, Seri B Februari 2020 Halaman 2234-2249 Universitas Negeri Padang ISSN: 2656-3649
10	Dwi Saraswati dan Yunita Sari Rioni 2019 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, <i>Leverage</i> terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Pemerintah Daerah • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • <i>Leverage</i> 	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik Vol. 9 No. 2 Februari 2019 Halaman 110-120 Universitas Pembangunan Panca Bali ISSN: 20874669
11	Ni Putu Gina Sukma Antari dan Ida Bagus Panji Sedana 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Belanja Modal • Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda 	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan	E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana Vol. 7, No. 2 2018 Halaman 1080-1110 ISSN: 2302-8912

	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah			Pemerintah Daerah, sedangkan Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	
12	Winda Khairana dan Anang Subardjo 2018 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kualitas SDM, Kompleksitas, dan Ukuran Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Kompleksitas Daerah • Ukuran Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi • Kualitas SDM • Kelemahan Pengendalian Internal 	Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal, Ukuran Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal, dan Kompleksitas Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol.7, No. 5 Mei 2018 Halaman 1-19 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya e-ISSN: 2460-0585
13	I Gusti Made Ary Anggara Tama dan Priyo Hari Adi 2018 Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Pemerintah Daerah • Kinerja Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik Kepala Daerah • Temuan Audit • Menggunakan Analisis Linear Berganda 	Ukuran dan Karakteristik Kepala Daerah yang diproyeksikan oleh lama masa kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Temuan Audit BPK dan Karakteristik Kepala Daerah yang	Perspektif Akuntansi Vol. 1, No. 1 Oktober 2018 Halaman 91-113 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana ISSN: 2623-0194 (Print) ISSN: 2623-0186 (Online)

				diproyeksikan oleh umur dan pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	
14	Neni Nurhayati dan Amir Hamzah 2020 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Pemerintah Daerah • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi 	Pertumbuhan Ekonomi dan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Jurnal Ekonomi dan Akuntansi dan Manajemen Vol.1, Issue 1 Desember 2020 Halaman 22-34 ISSN: 1358-0394
15	Indriani Azis dan Dini Wahjoe Hapsari 2020 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah terhadap <i>Internet Financial Reporting</i> (Studi Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Pemerintah Daerah • Menggunakan Analisis Regresi Data Panel 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Belanja Daerah • <i>Internet Financial Reporting</i> 	Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah berpengaruh secara simultan terhadap <i>Internet Financial Reporting</i> . Secara parsial Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh	<i>E-Proceeding of Management</i> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom Vol. 7, No. 2 Agustus 2020 Halaman 3263 ISSN: 2355-9357

	Timur Periode 2015-2018)			signifikan positif, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap <i>Internet Financial Reporting</i> .	
16	Rudythia Dwitama dan Sri Rahayu 2020 Pengaruh Ukuran Pemerintah, <i>Intergovernmental Revenue</i> , dan Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014- 2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Pemerintah Daerah • <i>Intergovernmental Revenue</i> (Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah) • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah • Menggunakan Analisis Regresi Data Panel 	• Opini Audit	Ukuran Pemerintah, <i>Intergovernmental Revenue</i> , dan Opini Audit secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Rasio Efektivitas dan Efisiensi. Sedangkan secara Parsial, Ukuran Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Rasio Efisiensi, <i>Intergovernmental Revenue</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan Opini Audit berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	<i>E-Proceeding of Management</i> Vol. 7, No. 2 Agustus 2020 Halaman 3251 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom ISSN: 2355-9357

				berdasarkan Rasio Efisiensi.	
17	Armaja, Ridwan Ibrahim, dan Aliamin 2015 Pengaruh kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh)	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Daerah • Dana Perimbangan • Belanja Daerah 	Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah baik secara bersama-sama maupun secara terpisah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.	Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Universitas Syiah Kuala Vol. 3, No. 2 September 2015 Halaman 168-181 Universitas Syiah Kuala ISSN: 2502-6976
18	Sri Mulyani dan Hardiyanto Wibowo 2017 Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, <i>Intergovernmental Revenue</i> , dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Pemerintah Daerah • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal • Intergovernmental Revenue • Pendapatan Asli Daerah 	Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan <i>Intergovernmental Revenue</i> , Ukuran Pemerintah Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	KOMPARTEMEN Vol. XV, No. 1 Maret 2017 Halaman 57-66 Universitas Muhammadiyah Purwokerto ISSN: 2579-8928
19	Nuwun Priyono, Siti Arifah, dan Eva Wulandari 2018 Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kompleksitas Pemerintah Daerah, dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kinerja Fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Kompleksitas Pemerintah Daerah (Jumlah Penduduk) • Karakteristik Pemerintah Daerah (Ukuran Pemerintah Daerah dan Tingkat Ketergantungan) • Kinerja Fiskal 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompleksitas Pemerintah Daerah (Jumlah SKPD) • Karakteristik Pemerintah Daerah (Kekayaan Pemerintah Daerah) • Kemandirian Keuangan Daerah 	Hanya kekayaan Daerah dan Jumlah Penduduk berpengaruh secara parsial terhadap kinerja fiskal, sedangkan secara simultan, Ukuran Pemerintah Daerah, kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, dan Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh	Jurnal MONEX Vol. 7, No. 2 Juni 2018 Halaman 404-410 Fakultas Ekonomi Universitas Tidar p-ISSN: 2089-5321 e-ISSN: 2549-5046

				secara bersama-sama terhadap Kinerja Fiskal.	
20	Ardiyanto, N., Ayu Febriyanti, Sarikadarwati, dan Susi Ardiani (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintahan terhadap Kinerja keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan (Studi Empiris pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2013-2017).	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penduduk (Kompleksitas Pemerintah Daerah) • Ukuran Pemerintah Daerah • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Analisis Regresi Berganda 	Jumlah Penduduk, Ukuran Pemerintah Daerah dan Kekayaan Pemerintah Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Jurnal Riset Terapan Akuntansi Vol. 3, No. 2 2019 Halaman 106-117 p-ISSN: 2579-969X e-ISSN: 26227940

Nadia Rafaini Putri (2022) 183403133

Pengaruh Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Survei pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020)

Sumber: Jurnal

2.2 Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah adalah suatu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pada pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri berjalannya pemerintahan. Penerapan otonomi daerah sendiri dimaksudkan agar pemerintah dapat dengan mandiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat mensejahterakan masyarakat. Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menggali potensi-potensi daerahnya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah baik dalam hal keuangan maupun non-keuangan. Pemerintah

Daerah juga diharapkan mampu dalam membiayai pembangunan daerah dengan mengoptimalkan potensi yang ada dan tidak terlalu bergantung kepada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Menurut Mardiasmo (2009:18), salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang diatur dengan hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengawasi dan mengatur kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap pemerintah daerah agar mampu memenuhi setiap kebutuhan daerahnya. Menurut Sularso dan Restianto (2011), kemajuan yang didapatkan oleh suatu daerah merupakan hasil dari keberhasilan daerah tersebut dalam mengelola keuangan daerahnya.

Kinerja Keuangan pemerintah adalah suatu pencapaian dari program atau kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu yang kemudian diukur dengan indikator-indikator keuangan (Saraswati, 2019).

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan pengukuran kinerja keuangan menggunakan salah satu rasio keuangan yaitu pertumbuhan pendapatan asli daerah. Kinerja keuangan dalam penelitian ini dinilai dari laju pertumbuhan pendapatan asli daerahnya. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini dilihat dari

seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi daerah sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Rasio pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah kinerja anggaran pemerintah daerah mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif pada tahun anggaran bersangkutan atau pada beberapa periode anggaran. Pertumbuhan pendapatan yang positif dengan kecenderungan meningkat menunjukkan terjadinya peningkatan kinerja pendapatan, sedangkan pertumbuhan pendapatan yang negatif menunjukkan penurunan kinerja pendapatan (Mahmudi, 20019:137).

Dalam mencapai pengelolaan keuangan yang baik, tentu saja tidak terlepas dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Primadiva, dkk (2021) menghasilkan bahwa Tingkat Kekayaan dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Tama (2018) menghasilkan bahwa ukuran dan karakteristik kepala daerah yang diproyeksikan dengan lama masa kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan temuan audit BPK dan karakteristik kepala daerah yang diproyeksikan dengan umur dan pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Priyono, dkk (2018) mengatakan bahwa ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, jumlah penduduk, jumlah SKPD, dan kemandirian keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap

kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari beberapa faktor yang sudah disebutkan di atas, penulis meneliti tiga faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu tingkat ketergantungan keuangan daerah, ukuran pemerintah daerah, dan kompleksitas pemerintah daerah.

Tingkat ketergantungan keuangan daerah suatu adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah dalam mengandalkan pemerintah pusat dalam hal pembiayaan dalam pembangunan daerah. Tingkat ketergantungan keuangan daerah juga dapat didefinisikan sebagai ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan dalam daerah dengan melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (Bisma dan Susanto, 2010). Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah tercermin dalam besarnya dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Semakin tinggi total dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat, maka semakin tinggi pula tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah tersebut kepada pemerintah pusat.

Pengalokasian dana transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan digunakan oleh pemerintah daerah secara mandiri untuk mewujudkan pelayanan kepada publik atau untuk kepentingan lainnya. Dengan diberikannya dana transfer yang sesuai dengan kebutuhan, diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan kinerja yang baik. Penggunaan dana transfer yang dikelola secara efisien dalam melakukan pembiayaan program dan kegiatan daerah dan berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut telah optimal. Ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat dapat diturunkan dengan pendapatan asli daerah

(Nugroho, 2012). Peningkatan pendapatan asli daerah dapat meminimalisir ketergantungan dan menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu membiayai pengeluaran daerahnya menggunakan sumber utama dari pendapatan asli daerahnya.

Dalam penelitian ini pengukuran tingkat ketergantungan keuangan daerah diukur dengan menggunakan rasio ketergantungan yaitu dengan membagi total dana transfer dengan total pendapatan daerah.

Penelitian terdahulu yang sejalan dengan adanya pengaruh tingkat ketergantungan keuangan daerah dengan kinerja keuangan daerah adalah penelitian Husnul (2019) yang mengatakan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Penelitian Purwanto dan Kiswanto (2016) yang mengatakan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, penelitian Susilowati (2016) mengatakan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, penelitian Maulidya (2021) mengatakan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Aulia dan Rahmawaty (2020) mengatakan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Ukuran pemerintah daerah adalah skala yang menunjukkan besar kecilnya suatu pemerintah daerah (Hartono, dkk. 2018). Noviyanti dan Kiswanto (2016) mengatakan bahwa ukuran pemerintah daerah adalah besar kecilnya pemerintahan

yang diukur dengan aset pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, ukuran pemerintah daerah diukur dengan menggunakan total aset.

Ukuran pemerintah yang besar dapat memberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam pemberian pelayanan yang memadai kepada masyarakat (Kusumawardani, 2012). Dengan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pelayanannya kepada masyarakat. Selain itu, ukuran pemerintah yang besar menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai sumber daya yang lebih besar untuk memaksimalkan pendapatan asli daerahnya. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatakan bahwa manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau belanja bagi pemerintah. Total aset yang dimiliki pemerintah daerah yang digunakan secara maksimal dalam jumlahnya yang besar dapat mendongkrak kinerja keuangan pemerintah daerah (Maulina, dkk. 2021). Semakin banyak aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka fasilitas yang terdapat di daerah tersebut semakin baik, dan seharusnya kinerja keuangan maupun non keuangan pemerintah daerah menjadi semakin baik (Prianka, 2015). Hal ini menunjukkan adanya pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian terdahulu yang sejalan dengan keterkaitan antara ukuran pemerintah daerah yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dan Hamzah (2020) mengatakan bahwa ukuran

pemerintah daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan jika terjadi kenaikan pada variabel ukuran pemerintah daerah maka kinerja keuangan pemerintah daerah pun akan mengalami kenaikan, begitupun sebaliknya jika variabel ukuran pemerintah daerah mengalami penurunan maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami penurunan, penelitian yang dilakukan oleh Tama dan Adi (2018) mengatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Mustanda (2019) mengatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, penelitian yang dilakukan oleh Natoen dkk (2019) mengatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2019) mengatakan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kompleksitas pemerintah daerah adalah kondisi dimana terdapat beragam faktor dengan karakteristik berbeda-beda yang mempengaruhi pemerintah secara langsung maupun tidak langsung (Khasanah, 2014). Pengukuran terhadap kompleksitas pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan jumlah penduduk. Penggunaan jumlah penduduk sebagai indikator kompleksitas pemerintah daerah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Priyono, dkk (2018), Pandansari (2016), dan Lubis (2018).

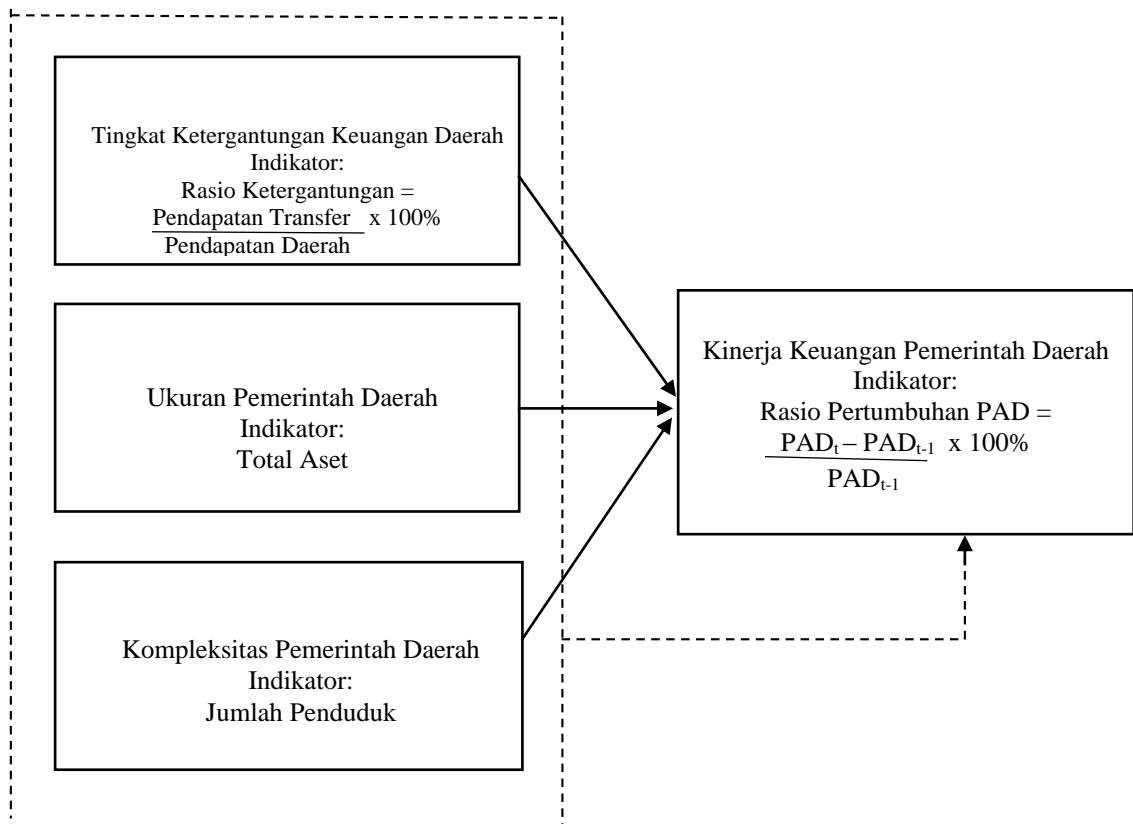
Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak pula fasilitas yang harus disediakan oleh pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan

penduduk. Dalam hal ini pemerintah akan dituntut untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik dan tetap menjaga kinerja keuangannya agar tetap baik agar mampu dalam membiayai pengadaan fasilitas yang dibutuhkan. Jumlah penduduk dapat mempengaruhi belanja daerah yang dialokasikan dengan peningkatan fasilitas yang memadai. Semakin baik sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu daerah, maka diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian penduduk daerah tersebut. Jika perekonomian suatu daerah semakin baik, maka akan terjadi peningkatan pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah (Prianka, 2015). Hal ini sejalan dengan Handayani (2008) yang mengatakan penduduk merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Handayani (2008) juga mengatakan peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi. Hal ini kemudian akan mendorong peningkatan produksi sehingga akan mengakibatkan terjadinya perluasan usaha dan pendirian usaha baru pada sektor produksi. Pendirian usaha baru akan menambah orang yang bekerja sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat. Terjadinya peningkatan pendapatan daerah dapat mendukung kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu yang sejalan terkait dengan adanya pengaruh kompleksitas pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan daerah adalah penelitian yang dilakukan oleh Priyono, dkk (2018) mengatakan bahwa kompleksitas pemerintah daerah yang diprosikan dengan jumlah penduduk berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, penelitian yang dilakukan oleh Prianka (2015) mengatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh

negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, penelitian yang dilakukan oleh Natoen dkk (2019) mengatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis mengajukan judul **“Pengaruh Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”**. Adapun kerangka pemikiran teoritis dan indikator dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Secara Parsial = _____

Secara Bersama-sama = -----

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Kompleksitas Pemerintah Daerah berpengaruh secara Bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah;

2. Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Kompleksitas Pemerintah Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Daerah.